



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 104 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 104

meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

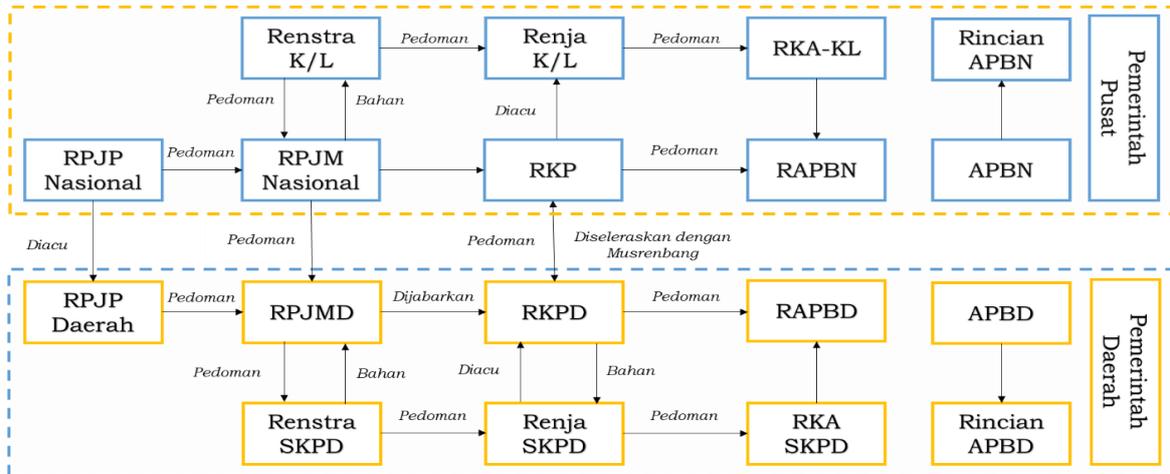
- a. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. **politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. **holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. **integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. **spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1

Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa R Pamulihan merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur

dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Pamulihan Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Seiring terjadinya *Coronavirus Disease* atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan

kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyaterintegrasi dan bersinergi Pamulihanempat

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, maka proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik,**

Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang diturunkan ke dalam Program Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun ke empat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pamulihan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pamulihan tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulihan tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pamulihan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulihan tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pamulihan ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulihan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan Tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pengadaan Meubeulair
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor
3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :
 - 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
 - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
 - 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
 - 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
 - 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
 - 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
 - 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
 - 9) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
 - 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
 - 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-

hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 23 Kegiatan terdapat 5 (sembilan) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (87,01)
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (99,20%)
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (98,41%)
4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (97,97%)
5. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal (99,77%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.775.291.130	1.609.288.163	90,65 %
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.275.311.634	1.112.643.363	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.250.333.834	1.087.865.563	87.01
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.977.800	24.777.800	99.20

2	Administrasi Umum Perangkat daerah			
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.762.200	116.877.500	98.41
3	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.550.000	70.100.000	97.97
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.550.000	70.100.000	97.97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	280.996.900	280.996.700	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.329.900	10.329.900	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.316.300	103.076.300	99.77
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	103.316.300	103.076.300	99.77
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	103.316.300	103.076.300	99.77
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	100.000.000	100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.999.800	14.999.800	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
*Factor penghambat ketidak tercapaiannya target kinerja
Berada pada pembahasan dipoint selanjutnya:*

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 23 Kegiatan terdapat 18 (delapan belas) Kegiatan yang

target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
4. Kegiatan Penyediaan Komponen instalai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
5. Kegiatan Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Kegiatan Penyeelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP;
9. Kegiatan Pengadaan Meubeul;
10. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Operasional;
13. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
14. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
15. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;
16. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
17. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
18. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.775.291.134	1.609.288.163	90,65

1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	55.035.000	55.035.700	100%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.035.700	15.035.700	100%
	2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.789.200	13.789.200	100%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.789.200	13.789.200	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.786.900	240.786.900	100%
	1. Penyediaan Komponen instalai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.990.000	24.990.000	100%
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.668.900	27.668.900	100%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.338.700	13.338.700	100%
	4. Fasilitas Kunjungan Tamu	40.120.000	40.120.000	100%
	5. Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.250.000	45.250.000	100%
	6. Pengadaan Meubel	13.578.800	13.578.800	100%
	7. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.528.500	10.528.500	100%
	8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.990.000	19.990.000	100%
	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Operasional	20.477.000	20.477.000	100%
	10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.850.000	24.850.000	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	244.988.700	244.988.700	100%
1.	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	244.988.700	244.988.700	100%

	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	244.988.700	244.988.700	100%
2	Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan	36.008.200	36.008.200	100%
	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	36.008.200	36.008.200	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.329.900	10.329.900	100%
1	Koordinasi pemberdayaan Desa	10.329.900	10.329.900	100%
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.329.900	10.329.900	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.316.300	103.076.300	99,77
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintrahan Umum	100.000.000	100.000.000	100%
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100.000.000	100.000.000	100%
	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	100.000.000	100%
6	Program Pembinaa dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.999.800	14.999.800	100%
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14.999.800	14.999.800	100%
	1. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Mayarakat Desa	14.999.800	14.999.800	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 Kecamatan Pamulihan

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pamulihan pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pamulihan.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah

pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Pamulihan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pamulihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Pamulihan tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pamulihan
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	D	E	f	g	H	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81					
						Semester 1	81	83,47	83,47	
						Semester 2	81	83,58	83,58	
						Kondisi Akhir (F)		92,72	92,72	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 4	B	C	47,51	
						Kondisi Akhir (F)	100	100.00		

Sumber : Hasil SKM, Hasil Penilaian SAKIP

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Pamulihan tahun 2021, ada 1 sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiip kurang dengan nilai 47,51.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 83,53%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau kurang tercapainya dari target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, sedangkan factor penghambat ketidak tercapaian nya indicator tersebut di karenakan kendala dilapangan berupa kurangnya penyajian dokumen dokumen yang di perlukan sebagai bahan acuan penilaian sakiip.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pamulihan Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian

pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pamulihan

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Wajib									
7	Bidang Urusan Pemerintahan									
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran								

7	1	1	##	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48.415.700	6.000.000	10.528.500	10.528.500	100%	14.137.200	30.665.700	63%
7	1	24	1	6	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102.451.600	2.350.000	20.477.000	20.477.000	100%	18.990.000	41.817.000	41%
7	1	24	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	82.715.400	7.585.000	19.990.000	19.990.000	100%	12.175.600	39.750.600	48%
7	1	24	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	20.000.000	3.500.000	5.600.000	5.600.000	100%	5.000.000	14.100.000	71%
7	1	24	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	150.000.000	30.958.000	42.000.000	42.000.000	100%	45.000.000	117.958.000	79%
7	1	24	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	30.000.000	3.980.000	7.500.000	7.500.000	100%	95.000.000	106.480.000	355%

7	1	24	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50.594.280	9.945.000	24.990.000	24.990.000	100%	5.689.540	40.624.540	80%
7	1	24	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	82.715.400	19.158.100	21.000.000	2.100.000	10%	17.813.800	39.071.900	47%
7	1	24	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	47.300.000	7.000.000	25.000.000	25.000.000	100%	7.000.000	39.000.000	82%
7	1	24	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	247.560.383	40.120.000	40.120.000	40.120.000	100%	40.000.000	120.240.000	49%
7	1	24	1	94	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	162.433.628	35.000.000	45.250.000	45.250.000	100%	36.090.000	116.340.000	72%
7	1	24	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai								
7	1	24	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.687.921.310	69.921.700	70.100.000	70.100.000	100%	53.873.086	193.894.786	4%

7	1	24	2	10	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Meubeulair yang memadai	39.213.360	17.328.900	13.578.800	13.578.800	100%		30.907.700	79%
7	1	24	2	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	60.000.000	13.479.730	13.500.000	13.500.000	100%	14.000.000	40.979.730	68%
7	1	24	2	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	194.150.500	11.500.000	24.850.500	24.850.500	100%	38.584.000	74.934.500	39%
7	1	24	2	45	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan penunjang gedung Kantor yang memadai	95.000.000	24.850.500			#DIV/0!	38.584.000	63.434.500	67%
7	1	24	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publik								
7	1	24	82	11	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Jumlah desa yang melaksanakan peraturan dan administrasi desa	77.193.600	8.755.000	14.999.800	14.999.800	100%	12.104.000	35.858.800	46%
7	1	24	82	19	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor PBB tingkat kecamatan	1				#DIV/0!		-	0%

7	1	24	82	48	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas tingkat kecamatan	-	-	-	-	0%	-	#DIV/0!	
7	1	24	82	49	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK tingkat Kecamatan	65.000.000	10.025.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	40.025.000	62%
7	1	24	82	##	Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyaluran BPNT	-	-			#DIV/0!	-	#DIV/0!	
7	1	24	82	##	Penyusunan RPTK Kecamatan	Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan	129.279.300	10.000.000	15.035.700	15.035.700	100%	10.456.000	35.491.700	27%
7	1	24	82	##	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	110.000.000	22.000.000	40.000.000	40.000.000	100%	25.000.000	87.000.000	79%
7	1	24	82	##	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	60.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	16.000.000	44.000.000	73%
7	1	24	82	##	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan yang dibina	1	-			#DIV/0!	15.567.200	15.567.200	%

7	1	24	82	##	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang dibina	1	-			#DIV/0!	-	0%	
7	1	24	82	##	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	47.300.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	100%	13.652.000	37.652.000 0	80%

Sumber : Laporan realisasi anggaran Kecamatan Pamulihan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pamulihan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	83	82	83	84	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			68	69	70	75	80	69	70	72	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	89	90	95	100	85	89	90	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	B	B	BB	C	C	B	

Sumber : Penilaian Sakip, survey Kepuasan Masyarakat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pamulihan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Pamulihan (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Pamulihan sebesar Rp. 3.340.400.000-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pamulihan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Pamulihan mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Pamulihan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

KECAMATAN : PAMULIHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
701		KECAMATAN								3,340,400,000				3,593,045,000
7011		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,570,400,000				2,766,545,000
70111		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								66,400,000				69,720,000
701111	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	18,000,000	DAU		Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	18,900,000
701117	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	2 laporan	100 B	48,400,000	DAU		Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	50,820,000
70020		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,530,000,				1,638,000,

1	1	2									000				000		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	JJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Bulan	100 B	1,500,000,000	DAU	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	1,606,500,000
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Laporan	100 B	30,000,000	DAU	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	31,500,000
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25,000,000				26,500,000	
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Porsentase ASN yang memiliki prestasi kinerja baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	17 orang	100 B	25,000,000	DAU	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	26,500,000
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							307,000,000				331,100,000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Paket	100 B	30,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	31,500,000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan	Persentase sarana	Jumlah Paket Peralatan dan	Indek kepuasan	Kab. Garut,	100 %	1 Paket	100 B	75,000,000	DAU	Persentase sarana	100 %	78,750,000

					Perlengkapan Kantor	prasarana aparatur berkondisi baik	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Masyarakat	Pamulihan, Pakenjeng						prasarana aparatur berkondisi baik		
7011603					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100%	1 Paket	100 B	35,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100%	36,750,000
7011605					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100%	12 Paket	100 B	17,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100%	17,850,000
7011606					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100%	12 Dokumen	100 B	25,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100%	26,250,000
7011608					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100%	12 Laporan	100 B	50,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100%	52,500,000
7011609					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100%	12 Laporan	100 B	50,000,000	DAU	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100%	52,500,000
700201					Penatausahaan	Persentase	Jumlah Dokumen	Indek	Kab.	100	1 Dokum	100 B	25,000,000	DAU	Persentase	100	35,000,000

1	1	6	0	Arsip Dinamis pada SKPD	sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kepuasan Masyarakat	Garut, Pamulihan, Pakenjeng	%	en					sarana prasarana aparatur berkondisi baik	%			
7	0	0	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								500,000,000							550,000,000
7	0	0	2.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 B	500,000,000	DAU		Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	550,000,000		
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								34,500,000							36,225,000
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indek kepuasan masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	12,500,000	DAU		Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,125,000		
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indek kepuasan masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	22,000,000	DAU		Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	23,100,000		
7	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								107,500,000							115,000,000
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje	100 %	11 Unit	100 B	25,000,000	DAU		Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	26,250,000		

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		ng													
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Paket	100 B	27,500,000	DAU		Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	28,750,000			
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Gedung	100 B	55,000,000	DAU		Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	60,000,000			
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										310,000,000					325,500,000	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																262,500,000
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	9 Dokumen	100 B	250,000,000	DAU		Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100 %	262,500,000			
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																63,000,000
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	5 laporan	100 B	60,000,000	DAU		Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100 %	63,000,000			

7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 laporan	100 B	20,000,000	DAU	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21,000,000
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	15,000,000	DAU	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	30,000,000
7	0	0	2.0	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	4 Dokumen	100 B	20,000,000	DAU	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21,000,000
7	0	0	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	20,000,000	DAU	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21,000,000
												TOTAL	3,340,400,000				3,593,045,000

Sumber : Rancangan Awal pada SIPD 2023 Kec. Pamulihan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pamulihan Melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pamulihan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Pamulihan Kabupaten

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 31 Januari 2022

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Pamulihan
Tahun : 2023

Bidang : Perekonomian dan SDA

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Bantuan sarana usaha peternakan domba	- Desa Garumukti, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak domba	3 Kelompok	
2	Bantuan sarana usaha peternakan domba	- Kp. Cikopo RW 002 SDN 2 PANAWA, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak domba	4 Kelompok	
3	Bantuan sarana usaha peternakan domba	- Kp. Tangsi RW 07, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak domba	5 Kelompok	
4	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Cisandaan RW 02, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak Kambing	2 Kelompok	
5	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- KP. GADOG RW 01, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	2 Kelompok	
6	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. NAgrog Rt 02 RW 03, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	2 Kelompok	
7	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Karang Taruna, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	2 Kelompok	

8	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Bebedahan RT 01 RW 05, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
9	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
10	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Cilingsgar Kidul RT 09 RW 01, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
11	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Naringgul RT 08 RW 01, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
12	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Wates RT 03 RW 04, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
13	Bantuan sarana usaha peternakan Kambing	- Kp. Wates RW 04, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha ternak kambing	1 Kelompok	
14	Hibah Mesin - Mesin Konveksi	- Desa Garumukti, Kab. Garut	Jumlah hibah mesin konveksi yang di salurkan	1 unit	
15	Alat Pengolahan Kopi	- Kp. Babakan RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah mesin sarana alat pengolahan kopi yang di salurkan	3 unit	
16	Alat Pengolahan Kopi	- Kp. Pangkalan RT 03 RW 01, Kab. Garut	Jumlah mesin sarana alat pengolahan kopi yang di salurkan	5 unit	
30	Alat Pengolahan Kopi	- Kp. Wanagiri RW 06, Kab. Garut	Jumlah mesin sarana alat pengolahan kopi yang di salurkan	3 unit	
17	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Bebedahan RT 01 RW 05, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
18	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
19	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Cikubang RT 03 RW 02, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
20	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Cilingsgar Kidul RT 09 RW 01, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
21	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Cisarua RW 06, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	

22	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Lembur Landeuh RT 03 RW 05, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
23	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- Kp. Wates RT 03 RW 04, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi perikanan	1 Kelompok	
24	Jalan Usaha Tani	- Kp. Lembur Landeuh - Kp. Cicembang, Kab. Garut	Jumlah paket yang di terima dalam kegiatan jalan usaha tani	1 Paket	
25	Jalan Usaha Tani	- Kp. Parinunggal RT 02 Rw 02, Kab. Garut	Jumlah paket yang di terima dalam kegiatan jalan usaha tani	1 Paket	
26	Jalan Usaha Tani	- Kp. Cisandaan RT 06 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket yang di terima dalam kegiatan jalan usaha tani	1 Paket	
27	Jalan Usaha Tani	- Kp.GAdog RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket yang di terima dalam kegiatan jalan usaha tani	1 Paket	
28	Jalan Usaha Tani	- Kp.Sukamaju RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket yang di terima dalam kegiatan jalan usaha tani	1 Paket	
31	Bantuan sarana usaha peternakan Ayam Petelur	- KP. Pakenjeng RW 08, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha peternak ayam petelur	2 Kelompok	
32	Bantuan sarana usaha peternakan Sapi Potong	- Kp. Wanagiri Rw 06, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana usaha peternak sapi potong	2 Kelompok	
33	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	- Kp. Kombongan RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam kegiatan pembangunan desa wisata	1 Paket	
34	Lambung Pangan	- Kp. Kombongan Dusun 3, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana lambung pangan	1 Kelompok	
35	Bantuan sarana peroduksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan)	- Kp. Sukamaju RW 07, Kab. Garut	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi tanaman hortikultura	2 Kelompok	

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

NO	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelebaran Jalan Kabupaten mmenuju Setandar Pakenjeng	Desa Pananjung sampai Desa Linggarjati	Jumlah paket yang dilaksanakan damal	4 Pake	

	Lama-Nangkaruka		pelebaran jalan kabupaten	t	
2	Pembangunan Jalan Kp.Cilimus-Kp. Cibitung	Kp. Cilimus RT 02 RW 03 Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan jalan	1 Paket	
3	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Pakenjeng RW 09 Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan jalan	1 Paket	
4	Rehabilitasi Jalan Desa	Kp. Cipicung RT 04 RW 02, Desa garumukti	Jumlah paket dalam rehabilitasi jalan	1 Paket	
5	Rehabilitasi Jalan Desa	KP CIKUPA RW 04, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam rehabilitasi jalan	1 Paket	
6	Rehabilitasi Jalan Desa	Dusun 3 Kp. Stamplat, Desa Panawa	Jumlah paket dalam rehabilitasi jalan	1 Paket	
7	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Astana Panjang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
8	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Ciangkrong RT 02 RW 05, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
9	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Cibitung II RT 04 RW 03, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
10	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
11	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Pilar RT 02 RW 04, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
12	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Sinarasa RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	

13	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Cisarua RW 03, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
14	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Pangkalan RT 03 RW 01, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
15	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Tanjung Beureum RT 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
16	Pembangunan Gedung Posyandu	Kp. Sumadra RW 05, Desa Pananjung	Jumlah unit dalam pembangunan posyandu	1 Unit	
17	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Barubongkor RT 03 RW 02, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
18	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Ciangkrong RT 02 RW 05, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
19	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibitung I RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
20	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Kubang RT 04 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
21	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Mekaertani RT 04 RW 07, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
22	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sinarasa RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	

23	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cicembang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
24	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
25	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cilinggar Kidul RT 09 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
26	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cilinggar RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
27	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Limus Nunggal RT 06 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
28	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Naringgul RT 08 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
29	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Neundeut RT 04 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
30	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Pangkalan RT 03 RW 01, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
31	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah	Kp. Pangranegan RT 01 RW 08, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	

	Kumuh				
32	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp Wanagiri Rw 09, Desa Pakenjeng	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
33	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. GAdog RT 04 RW 02, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
34	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sumadra RW 04, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
35	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sumadra RW 05, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
36	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Arjuna RW 004 Dusun 2, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
37	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Stamplat Rw 007, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
38	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Tumaritis RW 005, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	
39	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.Pasirlengut RW 003, Kab. Garut	Jumlah Paket dalam pembangunan jalan lingkungan	1 Paket	

40	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Desa Garumukti, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
41	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Cileuleuy RT 01 RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
42	Pembangunan PJU Jalan Kabupaten	Kp. Saninten Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan - Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
43	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sumadra RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
44	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sumadra RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
45	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penerangan jalan umum	1 Paket	
46	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Jalan Kabupaten Kp. Cilimus RT 02 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
47	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Barubongkor RT 03 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
48	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibitung II RT 03 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	

49	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cileuleuy RT 01 RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
50	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Jatimanah RT 01 RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
51	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
52	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Pasirgaru RT 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
53	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Pilar RT 02 RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
54	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	SDN 2 Garumukti Kp. Cileuleuy RT 05 RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
55	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	SDN 3 Garumukti Kp. Cibitung II RT 03 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
56	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Blok Sawah Puncak RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
57	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Bebedahan RT 01 RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
58	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cicembang RT 01 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
59	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cicembang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
60	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	

61	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisarua RT 02 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
62	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Limus Nunggal RT 06 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
63	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	blok Sodong, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
64	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cihalang RT 02 RW 11, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
65	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cipakenjeng RW 09, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
66	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Kombongan RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
67	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. NAgrog Rt 02 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
68	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.NAgrog RT 01 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
69	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.Poko RT 02 RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
70	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.Sukamaju 2 RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
71	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp.Sukamaju RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
72	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Citampang RW 006, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	

73	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Tumaritis RW 005, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tembok penahan tanah	1 Paket	
74	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Bojongboled RT 03 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
75	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibitung II RT 03 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
76	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan RT 03 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
77	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. GAdog Rt 01 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
78	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Panyusunan RT 05 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
79	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju 2 RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
80	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju 2 RT 05 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
81	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan RT 03 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
82	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan RT 06 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
83	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Gadog RT 04 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
84	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju 2 RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	

85	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan Lpang RT 07 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
86	Penyediaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Jalan kabupaten Desa Garumukti,	Jumlah paket dalam penyediaan rambu lalu lintas	1 Paket	
87	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Pasirgaru RT 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penyediaan sarana sistem drainase	1 Paket	
88	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Astana Panjang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
89	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Gadog Rw 01 Rw 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
90	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Kombongan RT 01 RW 10, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
91	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Leuwigoong Rt 03 RW 08, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
92	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju RT 03 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
93	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.NAgrog RT 01 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
94	Perbaiki Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.Sukamaju RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan jalan lingkungan untuk cegah kumuh	1 Paket	
95	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Cileuleuy RT 01 RW 06, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan lingkungan	1 Paket	
96	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Blok Subari Kp. Pangkalan RT 03 RW 01,	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan	1 Paket	

	Perdesaan	Desa Linggarjati	lingkungan	t	
97	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Arjuna RW 004, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan lingkungan	1 Paket	
98	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Citampang RW 006, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan lingkungan	1 Paket	
99	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Pasirlengut RW 003, Kab. Garut	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan lingkungan	1 Paket	
100	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam perbaikan SPAM jalan lingkungan	1 Paket	
101	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Blok Ciletik Kp. Cikubang RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan irigasi	1 Paket	
102	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kp. Wates RT 03 RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan irigasi	1 Paket	
103	Pembangunan Madrasah	Kp. Cicembang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan madrasah	1 Paket	
104	Pembangunan Madrasah	Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan madrasah	1 Paket	
105	Pembangunan Madrasah	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Desa pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan madrasah	1 Paket	
106	Pembangunan Madrasah	Kp. Stamplat Rw 007, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pembangunan	1 Paket	

			madrasah	t	
107	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Cisarua RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tanggul sunagi	1 Paket	
108	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Cisarua RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan tanggul sunagi	1 Paket	
109	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Pakenjeng RW 09, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan tanggul sunagi	1 Paket	
110	Pembangunan Bank Sampah	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Desa pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan bank sampah	1 Paket	
111	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jalan kabupaten Blok Sodong, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
112	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Cikupa RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
113	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Cinangsi RT 02 Rw 08, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
114	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
115	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Panyusuhan RT 05 RW 07, Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
116	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Arjuna RW 004, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
117	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Cikopo RW 001, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	

118	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Stamplat Dusun 3, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
119	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Poko RT 01 RW 06, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
120	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sumadra RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
121	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp.Cisandaan RT 05 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
122	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp.Cisandaan RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
123	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp.NAgrog RT 01 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
124	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp.Sukamaju 2 RT 05 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
125	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan Rt 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
126	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. GAdog RT 04 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	

127	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju 2 RT 02 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
128	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sukamaju RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan sistem drainase lingkungan	1 Paket	
129	Peningkatan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Panyusunan RT 05 RW 07, Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pembangunan TPT	1 Paket	
130	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kp. Gadog RW 02, Desa pakenjeng	Jumlah paket peningkatan jaringan	1 Paket	
131	Rumah Ibadah	Kp. Cihalang Rw 11, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan rumah ibadah	1 Paket	
132	Rumah Ibadah	Kp. Kombongan Rt 02 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan rumah ibadah	1 Paket	
133	Rumah Ibadah	Kp. Komplek Pabrik Rw 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan rumah ibadah	1 Paket	
134	Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikoo Rw 001, Kab. Garut	Jumlah peningkatan sarana keagamaan	1 Paket	
135	Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Kp. Citampang RW 006, Kab. Garut	Jumlah peningkatan sarana keagamaan	1 Paket	
136	Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Kp. Tumaritis RW 005, Kab. Garut	Jumlah peningkatan sarana keagamaan	1 Paket	
137	Perbaiki Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Kombongan RW 03, Desa Pakenjeng	Jumlah peningkatan sarana keagamaan	1 Paket	

138	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikopo Rw 002, Desa panawa	Jumlah paket pembangunan tempat sampah	1 Paket	
139	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	Kp Gadog RW 02, Desa pakenjeng	Jumlah paket penataan TPU	1 Paket	
140	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisandaan Rt 01 RW 02, Desa pananjung	Jumlah paket penataan TPU	1 Paket	
141	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Kp. Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket pengadaan kendaraan angkutan sampah	1 Paket	
142	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Kp. Stamplat Dusun 3, Desa Panawa	Jumlah paket pengadaan kendaraan angkutan sampah	1 Paket	
143	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	kp. Pasirlengut RW003, Desa Panawa	Jumlah paket pengadaan kendaraan angkutan sampah	1 Paket	
144	Pengadaan Tong Sampah	Kp Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket pengadaan tOng sampah	1 Paket	
145	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
146	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	

147	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
148	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
149	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
150	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
151	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	
152	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Nagrog RT 01 RW 03, Desa Pananjung	Jumlah paket perbaikan rumah tak layak huni	1 Paket	

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

No	Usulan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-----------	---------------	---------------	--------------------------	-----------------------	----------------

1	Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Cisanadaan	Pananjung	Jumlah paket dalam pembangunan Rawat inap Puskesmas	1	Unit	
2	Pemagaran Halaman Sekolah - PAUD	Kp. Jatimanah RT. 01 RW. 04,Desa Garumkuti	Jumlah paket dalam pembangunan Pemagaran Halaman Sekolah	1	Paket	
3	Pembangunan RKB - PAUD	PAUD AL BAROKAH Kp. Cikubang RT 01 RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
4	Pembangunan RKB - PAUD	PAUD AN NAZAH Kp. Wates RT 02 RW 04, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
5	Pembangunan RKB - PAUD	PAUD AR RASYID Kp. Cicembang RT 02 RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
6	Pembangunan RKB - PAUD	PAUD AR RASYID Kp. Tanjung Beureum RT 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
7	Pembangunan RKB - PAUD	PAUD AR RASYID RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
8	Pembangunan RKB - PAUD	Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	unit	
9	Pemagaran Halaman Sekolah - PAUD	Desa Panawa, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan Pemagaran Halaman Sekolah	1	Paket	
10	Pengadaan Mebeuler - PAUD	Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pengadaan mebeler	1	Paket	
11	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket rehabilitas ruang kelas	4		
12	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	Kp. Pakenjeng Rt 02 Rw 09, Kab. Garut	Jumlah paket rehabilitas ruang kelas n	1		
13	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	SDN 1 Garumukti Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
14	Pemagaran Halaman Sekolah -	SDN 3 Garumukti Kp. Cibitung II RT 03	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	

	SD	RW 03, Kab. Garut				
15	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Kp. Bebedahan RT 01 RW 05, Desa Linggarjati	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
16	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Kp. Pakenjeng RT 01 RW 03, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
17	Rehabilitasi Ruang Kelas - SMP	Kp. Pakenjeng Rt 02 Rw 09, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Ruan gan	
18	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP	SMP IT AL_FAWAZ Kp. Jatimanah RT 01 RW 04, Desa garumukti	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
19	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP	Kp. Pakenjeng Rt 01 RW 02, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
20	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP	SDN 2 LINGGARJATI Kp. Cipeundeuy RW 05, Desa Linggarjati	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
21	Pemagaran Halaman Sekolah - SMP	Kp. Stamplat Rw 007, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pemagaran halaman sekolah	1	Paket	
22	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Masjid Al Waladul Barkah KP. Cibitung II RT 03 RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan Jamban	1	Paket	
23	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Masjid Jami Al Istiqomah Kp. Ciangkrong RT 01 RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan Jamban	1	Paket	
24	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Masjid Nurul Iman Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan Jamban	1	Paket	
25	Pembangunan RKB - SD	SDN 2 Garumukti Kp. Cileuleuy RT 05 RW 06, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1		

26	Penataan Halaman Sekolah - PAUD	PAUD MIFTAHUL BAROKAH Kp. Cilimus RT 02 RW 03, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan Penataan Halaman Sekolah	1	Paket	
27	Penataan Halaman Sekolah - SD	SDN 1 Garumukti Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan Penataan Halaman Sekolah	1	Paket	
28	Penataan Halaman Sekolah - SD	Kp. Kopab RW 05, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan Penataan Halaman Sekolah	1	Paket	
29	Penataan Halaman Sekolah - SD	Kp. Sumadra RW 05, Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pembangunan Penataan Halaman Sekolah	1	Paket	
30	Penataan Halaman Sekolah - SMP	SMP IT AL-FAWAZ Kp. Jatimanah RT 01 RW 04, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan Penataan Halaman Sekolah	1	Paket	
31	Pembangunan Jamban - SMP	Kp. Tangsi RW 07, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan Jamban	1	Paket	
32	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Desa Garumukti,	Jumlah paket dalam Penyuluhan pelatihan masyarakat	1		
33	Rehabilitasi Jamban - SD	SDN 1 Garumukti Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Desa Garumukti	Jumlah paket dalam pembangunan Rehabilitasi Jamban Sekolah	1	Paket	
34	Rehabilitasi Jamban - SD	Kp. Kombongan RW 03, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan Rehabilitasi Jamban Sekolah	1	Paket	
35	Rehabilitasi Jamban - SD	Kp. Arjuna RW 004, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pembangunan Rehabilitasi Jamban Sekolah	1	Paket	
36	Pembangunan RKB - SMP	SMPN Satap 1 Pamulihan Kp. Bebedahan RT 01 RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pembangunan RKB	1	Paket	
37	Pengadaan APE dalam - PAUD	PAUD AL - Barokah Kp. Cikubang RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pengadaan APE	1	Paket	

38	Pengadaan APE dalam - PAUD	PAUD AR RASYID Kp. Cicembang RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pengadaan APE	1	Paket	
39	Pembangunan Jamban - PNF/Kesetaraan	Kp. Stamplat Rw 007, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pembangunan Jamban	1	Paket	
40	Pengadaan Mebeuler - PNF/Kesetaraan	Kp. Stamplat RW 008, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pengadaan Mebeler	1	Paket	
41	Pembangunan Sumur Bor - SD	Kp. GAdog Rt 01 RW 07, Desa pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan Sumur	1	Paket	
42	Rehabilitasi Pustu	PUSTU Kp. Pasirgaru RT 01 RW 01, Desa Garumukti	Jumlah unit dalam pembangunan Rehabiulitasi Pustu	1	unit	
43	Penyuluhan dan Pelatihan pada masyarakat pada Desa/Kelurahan	Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, Kab. Garut	Jumlah paket dalam penyuluhan dan pelatihan	1		
44	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Cicembang Kp. Cicembang RW 07, Kab. Garut	Jumlah paket dalam pengadaan peralatan posyandu	1	Paket	
45	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Cikubang Kp. Cikubang RW 02, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	
46	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Cilinggar Kp. Cilinggar RW 01, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	
47	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Cipeundeuy Kp. Bebedahan RW 05, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	
48	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Cisarua Kp. Cisarua RW 03, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	
49	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Citampian Kp. Citampian RW 08, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	

50	Peralatan Posyandu (Paket)	Posyandu Wates Kp. Wates RW 08, Kab. Garut	Jumlah paket dalam peralatan posyandu	1	Paket	
51	Pemicuan pemantapan kualitas desa ODF	KP. CIPAKENJENG RT 01 RW 09, Kab. Garut	Jumlah kegiatan pemicuan pemantapan kualitas desa ODF	1	Kegiatan	
52	Pemicuan pemantapan kualitas desa ODF	Kp. Kopab RW 05, Kab. Garut	umlah kegiatan pemicuan pemantapan kualitas desa ODF	1	Kegiatan	
53	Bantuan Guru Ngaji	Desa Garumukti	Jumlah orang penerima bantuan	48	Orang	
54	Bantuan Guru Ngaji	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Kab. Garut Desa Pakenjeng	Jumlah orang penerima bantuan	48	Orang	
55	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah rumah penerima bantuan	68	Rumah	
56	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk RUTILAHU	Desa Panawa	Jumlah rumah penerima bantuan	68	Rumah	
57	Hibah Barang (BUMDes)	9RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08), Desa pakenjeng	Jumlah paket dalam hibanh barang bumdes	1	Paket	
58	Bantuan Modal Bumdes	dusun 1 dusun 2 dusun 3, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam b\ntu\n modal bumdes	1	Paket	
59	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Kp. Bebedahan RT 01 RW05, Desa Linggarjati	Jumlah paket dalam pembangunan secretariat RT/RW	1	Paket	
60	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	KP PAKENJENG DUSUN 1, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pembangunan secretariat RT/RW	1	Paket	
61	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT	Kp. Cisandaan Rt 05 RW 01, Desa	Jumlah paket dalam pembangunan secretariat	1	Paket	

	dan RW	Pananjung	RT/RW			
62	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Kp. Stamplat Rw 007, Desa Panawa	Jumlah paket dalam pembangunan secretariat RT/RW	1	Paket	
63	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	Kp. Kombongan Dusun 3, Desa pakenjeng	Jumlah paket dalam pengelolaan desa wisata	1	Paket	
64	Pembinaan Kader Dasawisma	KP. PAKENJENG DUSUN 2, Desa Pakenjeng	Jumlah kegiatan pembinaan kader posyandu	1	Kegiatan	
65	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	dusun 1 pakenjeng, Kab. Garut	Jumlah penerima bantuan modal usaha	80	Penerima	
66	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Kp. Pakenjeng RW 01, Kab. Garut	Jumlah penerima bantuan modal usaha	80	Penerima	
67	Melaksanakan edukasi pada masyarakat terampil dalam upaya pencegahan dini bahaya kebakaran ditingkat Masyarakat, Pemerintahan lembaga/perusahaan	Kp. Limus Nunggal RT 06 RW 01, Kab. Garut Desa Linggarjati	Jumlah penerima bantuan modal usaha	1	Kegiatan	
68	Melaksanakan edukasi pada masyarakat terampil dalam upaya pencegahan dini bahaya kebakaran ditingkat Masyarakat, Pemerintahan lembaga/perusahaan	Kp.Sukamaju 2 RT 02 RW 02, Desa Pananjung	Jumlah penerima bantuan modal usaha	1	Kegiatan	

69	Melaksanakan edukasi pada masyarakat terampil dalam upaya pencegahan dini bahaya kebakaran ditingkat Masyarakat, Pemerintahan lembaga/perusahaan	Kp. Cikopo Rw 002, Desa Panawa	Jumlah kegiatan pelaksanaan edukasi pada masyarakat	1	Kegiatan	
70	Pengadaan alat pemadam api ringan di tingkat masyarakat dan desa	Kp. Sumadra RW 05, Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pengadaan alat pemadam api ringan	1	Paket	
79	Pengadaan alat pemadam api ringan di tingkat masyarakat dan desa	Kp. Pakenjeng Rt 02 Rw 09, Desa Pakenjeng	Jumlah paket dalam pengadaan alat pemadam api ringan	1	Paket	
71	Pengadaan pakaian Linmas dengan prioritas pelaksanaan di Kecamatan Cisompet, Pamulihan, Singajaya, Cikelet, Bungbulang, Mekarmukti, Caringin, Banjarwangi, Peundeuy dan Pakenjeng	Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, Kab. Garut	Jumlah Orang penerima pengadaan pakaian Linmas	30	Orang	
72	Pengadaan pakaian Linmas dengan prioritas pelaksanaan di Kecamatan Cisompet, Pamulihan, Singajaya, Cikelet, Bungbulang, Mekarmukti, Caringin, Banjarwangi, Peundeuy dan Pakenjeng	Desa Pananjung	Jumlah Orang penerima pengadaan pakaian Linmas	1	Orang	

73	"Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)"	Desa Lingarjati	Jumlah Orang penerima pengadaan pakaian Linmas	1	Paket	
74	"Sarana dan Prasarana Kearsipan (Box Arsip, Sekat Besar, Sekat kecil, Folder Besar, Folder Kecil, Kartu Kendali Masuk dan Keluar, Disposisi, Label, Lemari Arsip, Lemari Kartu Kendali, Rak Arsip, Map Data Kepegawaian)"	Desa Pananjung	Jumlah paket dalam pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	1	Paket	
75	Kampung Ramah Anak (Kampung)	Kp. Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket pembangunan kampung ramah anak	1	Paket	
76	Kinerja Kampung KB (Persentase CU/PUS)	Kp. Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket Kinerja Kampung KB	1	Paket	
77	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya	Kp. Tangsi RW 07, Desa Pakenjeng	Jumlah orang pemberian kerja sementara system padat karya	150	orang	
78	Pembinaan Pendidikan Politik	Kp. Pakenjeng RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah kegiatan pembinaan Pendidikan politik	1	Kegiatan	
80	Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	Kp. Pakenjeng Rt 02 RW 01, Desa Pakenjeng	Jumlah paket penyediaan peralatan kesiapsiagaan bencana	1	Paket	

81	Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Sepak Bola Desa	Kp. Tangsi RW 07, Desa Pakenjeng	Jumlah paket rehabilitasi peningkatan lapang sepak bola	1	Paket	
82	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Kp. Pakenjeng RT 02 RW 09, Desa Pakenjeng	Jumlah paket Hibah sarana prasarana Olahraga	1	Paket	
83	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Desa Panawa, Kab. Garut	Jumlah paket Hibah sarana prasarana Olahraga	1	Paket	

Sumber : Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;

3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pamulihan mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pamulihan
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Pamulihan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pamulihan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pamulihan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pamulihan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pamulihan diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pamulihan . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pamulihan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pamulihan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan

seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pamulihan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pamulihan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pamulihan dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar **Rp. 3.340.400.000,-**.

Adapun Program Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pamulihan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Kecamatan : Pamulihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
							Lokasi	Targep Capaian Kinerja	Kebutuihan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Catat an Penti ng	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
													3,340,400,000				3,542,225,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,576,275,600				2,715,725,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									66,274,600				8,900,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %					8,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	8,678,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %						
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	7,272,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %						
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	8,771,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %						

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	8,771,200	-Dana Alokasi Umum		100 %	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	8,740,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	8,740,400	Dana Transfer Umum-um		100 %	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,530,000,000				1,638,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	1,606,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	31,500,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.0000.000				26,500,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	26,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				306,278,000				331,100,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Kab. Garut,	100 %	29,999,900	Dana Transfer Umum-Dana		100 %	31,500,000

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pamulihan Pakenjeng			Alokasi Umum			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	75,505,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	78,750,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	32,859,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	36,750,000
7	01	01	2.06	05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	16,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	17,850,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	24,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	26,250,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	50,014,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	52,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	49,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	52,500,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	25,934,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	35,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				487,436,400				550,000,000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	487,436,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	550,000,000

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36,501,600				36,225,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Porsentase pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	14,137,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	13,125,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	22,364,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	23,100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124,785,000				115,000,000
7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	24,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	26,250,000
7	01	01	2.01		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	27,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	28,750,000
7	01	01	2.01		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	72,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	60,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				309,915,200				325,500,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				249,917,600				262,500,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	249,917,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	262,500,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				59,997,600				63,000,000

7	01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Garut, Pamulihan Pakenjeng	100 %	59,997,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	63,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				84,999,000				93,000,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				59,999,800				63,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	umlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pamulihan , Pakenjeng	100 %	59,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	63,000,000
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				24,999,200			100 %	30,000,000
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Pamulihan , Pakenjeng	100 %	24,999,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				179,914,200				189,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				179,914,200				189,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Pamulihan , Pakenjeng	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	126,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan , Pakenjeng	100 %	59,914,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	63,000,000

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100,000,000				105,000,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,000,000				105,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	105,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				89,296,000				114,000,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				89,296,000				114,000,000
7	01	06	2.01	2	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	19,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	21,000,000
7	01	06	2.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	20,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	21,000,000
7	01	06	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	14,980,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	18,761,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	21,000,000
7	01	06	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan	umlah Dokumen	Kab.	100 %	15,110,400	Dana Transfer		100 %	21,000,000

				3	Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Garut, Pamulihan , Pakenjeng			Umum-Dana Alokasi Umum			
Total									3,340,400,000				3,542,225,00

Sumber : Rancangan Akhir SIPD Kecamatan Pamulihan Tahun 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sebesar Rp. 3.340.400.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.570.400.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 66.400.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.530.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 307.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 500.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 34.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air,

listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 107.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 310.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan

Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 250.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.000.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 85.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.000.000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 180.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pmulihan

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 180.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh

masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 95.000.000,-

- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pamulihan

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 3.340.400.000,- (Tiga Milyar Lima Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Pamulihan. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan, untuk lebih jelasnya tentang program kegiatan Kecamatan Pamulihan untuk Tahun 2023 beserta pagu anggarannya dapat di lihat di table 4.1 berikut.

**PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0	KECAMATAN							3.340.400.000						3.542.225.000				
7	0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.576.275.600						2.715.725.000			
7	0	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							66.274.600						18.900.000		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	JJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	100 B	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	18.900.000	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	8.678.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0	

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	7.272.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	8.771.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	8.771.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Laporan	100 B	8.740.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Laporan	100 B	8.740.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	0
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.530.000.000				1.638.000.000	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Bulan	100 B	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	1.606.500.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Laporan	100 B	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	31.500.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25.000.000				26.500.000	

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Porsentase ASN yang memiliki prestasi kinerja baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	17 orang	100 B	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Porsentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	26.500.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								306.278.000			331.100.000		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Paket	100 B	29.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	31.500.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Paket	100 B	75.505.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	78.750.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Paket	100 B	32.859.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	36.750.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	12 Paket	100 B	16.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	17.850.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	12 Dokumen	100 B	24.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	26.250.000

7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	50.014.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	52.500.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	49.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	52.500.000	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indek kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	25.934.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	35.000.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							487.436.400						550.000.000
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 B	487.436.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	550.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36.501.600						36.225.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indek kepuasan masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	14.137.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13.125.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indek kepuasan masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Laporan	100 B	22.364.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	23.100.000	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							124.785.000						115.000.000

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	11 Unit	100 B	24.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	26.250.000		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Paket	100 B	27.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	28.750.000		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Gedung	100 B	72.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100 %	60.000.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							309.915.200						325.500.000	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							249.917.600							262.500.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	9 Dokumen	100 B	249.917.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100 %	262.500.000		
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							59.997.600							63.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	5 laporan	100 B	59.997.600		Porsentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100 %	63.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							84.999.000							93.000.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							59.999.800							63.000.000

7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	umlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Porsentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 laporan	100 B	59.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100 %	63.000.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								24.999.200		30.000.000		
7	01	03	2,05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen kegiatan penanganan covid di tingkat Desa/Kelurahan	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								179.914.200		189.000.000		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								179.914.200		189.000.000		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	12 Laporan	100 B	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	100 %	126.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenje ng	100 %	1 laporan	100 B	59.914.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingk	100 %	63.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								100.000.000		105.000.000		

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							100.000.000				105.000.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 Dokumen		100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100 %	105.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							89.296.000			114.000.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							89.296.000			114.000.000		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	4 Dokumen	100 B	19.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21.000.000
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	12 laporan	100 B	20.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21.000.000
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	100 %	1 Dokumen	100 B	14.980.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	30.000.000
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Desa Berkinerja Baik		100 %	4 Dokumen	100 B	18.761.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21.000.000

7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Porsentase penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentas e Desa Berkinerj a Baik	Kab. Garut, Pamuli han, Pakenje ng	100 %	1 Dokum en	100 B	15.110.400	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Porsentase penyelengg araan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	21.000.00 0
TOTAL												3.340.400.000		3.542.225 .000			

Sumber : Ranhir SIPD Tahun2023 Kec. pamulihan

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Pamulihan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pamulihan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN